

## **Politik Kekerabatan Limpo di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan**

**<sup>1</sup>Imam Sumatri Ms**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Emai: imamfoz@gmail.com

### **Abstract**

This article will look at the extent of the impact of kinship politics in the electoral space. With the main focus of research on the political relations of the Yasin Limpo clan. This research uses a case study approach with supporting data obtained from the results of a literature study supported by reports and document releases from the government, such as BPS and KPU. The research portrays the politics of kinship taking place in Gowa, South Sulawesi. Using Winters' Oligarchy approach, to examine and explain kinship politics. This approach was chosen, because the Winterz-style oligarchy has rarely seen kinship politics as one of the variables that has contributed to the growth of oligarchy in Indonesia. The case in Gowa, South Sulawesi provides an abstraction to understand that kinship politics has a big role in preserving oligarchic politics.

**Keywords: Kinship Politics; Oligarchy; Local Politics.**

### **Abstrak**

Artikel ini akan melihat sejauhmana dampak politik kekerabatan dalam ruang elektoral. Dengan fokus utama penelitian pada relasi politik klan Yasin Limpo. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan data pendukung yang di peroleh dari hasil studi lietaratur yang di tunjang dengan laporan dan rilis dokumen dari pemerintah, seperti BPS dan KPU. Penelitian memotret politik kekerabatan yang berlangsung di Gowa, Sulawesi Selatan. Menggunakan pendekatan Oligarki Winters, untuk memeriksa dan menjelaskan politik kekerabatan. Pendekatan ini di pilih, pasalnya oligarki ala Winterz selama ini jarang melihat politik kekerabatan sebagai salah satu variabel yang ikut membesarkan oligarki di Indonesia. Kasus di Gowa, Sulawesi Selatan memberikan abstraksi untuk memahami politik kekerabatan punya andil yang besar dalam melestarikan politik oligarki.

**Kata Kunci: Politik Kekerabatan; Oligarki; Politik Lokal.**

### **PENDHAULUAN**

Artikel ini mengungkap tautan antara oligarki dan kekerabatan yang terjadi di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Oligarki Limpo yang sangat kuat tercermin oleh unggulnya kekerabatan Limpo dalam kontestasi electoral di kabupaten Gowa. Calon bupati Adnan Purichta Ikhsan Yasin Limpo yang merupakan anak kandung dari bupati

Gowa dua periode Ikhsan Yasin Limpo. Dalam menjelaskan politik kekerabatan Limpo digunakan konsep oligarki dari Richard Robison, Vedi hadiz dalam *Reorganising power: the politics of oligarchy in the age of markets* dan Jeffrey A. Winters dalam *oligarchy* yang menekankan pada kekayaan sumber daya material ekonomi dan politik. Ketiga ilmuwan tersebut sependapat bahwa

**Politik Kekeabatan Limpo di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan...**

demokratisasi menyebabkan perubahan politik di Indonesia sehingga oligarki dapat berdampak dengan demokrasi. Sehingga demokratisasi yang sudah berlangsung akan sangat berpotensi tetap eksis terhadap politik kekeabatan yang ada baik di tingkat lokal maupun nasional.

Fenomena politik kekeabatan di Indonesia sudah tidak menjadi hal yang asing lagi (Aspinall, 2014; Haryanto et al., 2019; McCarthy, 2004; Schrauwes, 1999; Weintraub, 2008). Salah satu politik kekeabatan yang hingga saat ini masih eksis di tingkat lokal adalah kekeabatan Limpo di Sulawesi Selatan (Purwaningsih, 2015; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018; Schofield, 2015). Studi ini berangkat dari fenomena politik kekeabatan Limpo yang masih sangat kuat di Sulawesi Selatan. Salah satu daerah yang menjadi arena kontestasi elektoral kekeabatan Limpo adalah di kabupaten Gowa. Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, terdapat dua pasangan calon kepala daerah yang berasal dari kekeabatan Limpo. Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan Tenri Olle Yasin Limpo. Adnan merupakan putra dari Ichsan Yasin Limpo yang merupakan Bupati Gowa dua periode sebelumnya. Berdasarkan survey LSI Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo

unggul dalam pilkada kabupaten Gowa. Hal ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya kekeabatan Limpo masih mempunyai pengaruh yang sangat besar. Penguasaan berbagai sumber daya dan jabatan politik oleh kekeabatan Limpo merupakan wujud dari oligarki Limpo yang sedang berlangsung di Sulawesi Selatan.

Posisi kekeabatan Limpo yang sangat kuat di Sulawesi Selatan memberikan dampak pada sulitnya pasangan calon pemimpin daerah menjadi seorang kepala daerah tanpa ada intervensi dukungan dari kekeabatan Limpo. Dengan menguasai dan mengendalikan berbagai sumber daya material yang dapat digunakan untuk mempertahankan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Berbagai jabatan strategis di Sulawesi Selatan baik dari unsur eksekutif maupun legislatif dan bahkan jabatan direktur BUMD dikuasai oleh kekeabatan Limpo. Penguasaan sumber daya di berbagai sektor ini membuat sistem politik kekeabatan yang sangat kuat.

Kuatnya posisi Limpo sebagai oligark sangat berpengaruh terhadap kontestasi yang berlangsung, khususnya di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Bupati

Gowa dua periode Ikhsan Yasin Limpo merupakan adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Kemudian dalam kontestasi electoral pada pilkada serentak 2015, Ikhsan Yasin Limpo memajukan anak kandungnya sendiri Adnan Purichta Ikhsan yasin Limpo sebagai calon bupati Gowa. Keinginan untuk menurunkan tahta kekuasaan kepada anak kandungnya sendiri merupakan tujuan bagi kekerabatan Limpo agar tetap eksis di Sulawesi Selatan.

Pencalonan Adnan Purichta Ikhsan Yasin Limpo sebagai calon bupati yang unggul dalam pilkada serentak 2015 menunjukkan bahwa mudahnya bagi kekerabatan Limpo menguasai berbagai sumber daya. Sehingga kerabat Limpo lah yang menjadi favorit masyarakat dalam memilih calon kepala daerahnya. Pengaruh kuat Ikhsan Yasin Limpo sebagai bupati memberikan keuntungan tersendiri bagi putranya Adnan dibandingkan dengan posisi Tenri Olle Yasin Limpo yang juga merupakan kakak kandung Ikhsan Yasin Limpo.

Masyarakat kabupaten Gowa tentu memiliki alasan mengapa memberikan kepercayaan terhadap kekerabatan Limpo yang menduduki jabatan politik atau sebagai pemimpin daerah. Salah satu

yang bisa dijadikan indikator adalah dengan melihat kinerja prestasi kepala daerah sebelumnya yang juga diduduki oleh kerabat Limpo. Selain factor kinerja tentu yang sangat besar pengaruhnya adalah factor keluarga Limpo itu sendiri yang memiliki nama yang sangat berpengaruh di kancah politik lokal di Sulawesi Selatan.

Kebesaran nama Limpo sebagai oligarki di tingkat lokal tidak terlepas dari sistem desentralisasi yang menyebabkan potensi politik kekerabatan di tingkat lokal semakin kuat dan berakar. Desentralisasi kekuasaan menyebabkan aktor di daerah mampu mendominasi dan menguasai sumber daya yang ada untuk mempertahankan apa yang dimilikinya (Fukuoka, 2012, 2013; Hadiz & Robison, 2013b, 2013a; Robison & Hadiz, 2004; Winters, 2013). Sangat berbeda pada rezim orde baru yang mana oligarki terjadi di tingkat nasional akibat sistem sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat (Sunardi, 2020; Susanti, 2018; Winters, 2013).

Salah satu permasalahan yang masih dialami oleh sebagai masyarakat adalah persoalan kemiskinan yang masih sangat tinggi. Posisi para oligark sebagai elit di tingkat lokal yang mempunyai sumber daya yang sangat banyak merupakan

tantangan tersendiri dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai pejabat publik. Penguasaan sumber daya yang besar belum tentu akan berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Program pengentasan kemiskinan yang terjadi di daerah merupakan komitmen bersama, agar penguasa memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor di masyarakat bawah.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi literatur. Data dan dokumen yang di peroleh berasal dari beberapa dokumen dan laporan resmi yang telah di rilis oleh pemerintah, seperti BPS dan KPU. Laporan dan dokumen dari BPS dan KPU sebagai rujukan utama yang digunakan dalam menganalisis persoalan politik kekerabatan.

Lokasi observasi yang di pilih adalah kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Lokasi ini di pilih setelah melihat karakteristik politik di Gowa khususnya di 20 tahun terakhir yang masih di dominasi oleh politik klan Yasin Limpo. Penulis sangat tertarik untuk melihat sejauhmana politik kekerabatan Yasin Limpo di Gowa Sulawesi Selatan bertransformasi di ruang elektoral.

Relasi politik digunakan sebagai unit analisis untuk mengungkap bagaimana corak dan motif politik kekerabatan yang berlangsung di Gowa Sulawesi Selatan. Menggunakan pendekatan teori oligarki Winters sebagai kerangka analisis sekaligus sebagai pembanding untuk melihat politik kekerabatan di Gowa, Sulawesi Selatan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keluarga Limpo di Sulawesi selatan telah dikenal sebagai keluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan di tingkat local Sulawesi Selatan. Kekuatan politik Limpo dibentuk dengan cara yang sangat sistematis. Penguasaan beberapa jabatan politik dan non politik di daerah membuat kontrol atas sumber daya dapat dilakukan oleh keluarga Limpo. Ysin Limpo merupakan salah satu pendiri Golkar di Sulawesi Selatan dan pernah menjabat sebagai bupati di kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Modal politik yang dimiliki keluarga Limpo sangat kuat terbangun sehingga dalam menempatkan kerabatnya di berbagai jabatan politik dan politik tidak menjadi perkara yang sulit.

Keluarga Limpo termasuk anak kandung dari Yasin Limpo banyak yang

menjadi tokoh penting dalam pemerintahan, politik maupun non politik dan pemerintahan, Di balik keberhasilan mereka Hj Nurhayati Yasin Limpo disebut-sebut sebagai ibu yang sukses memainkan peran politik di legislatif sekaligus sukses mendorong dan mengantar putra-putrinya menjadi seorang yang berpengaruh di Sulawesi Selatan. Tenri Olle Yasin Limpo,SH putri sulungnya adalah mantan Ketua DPRD Gowa periode 2009-2014, anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar 2014-2019, Ketua DPD Partai Golkar Gowa dan saat ini mundur dari DPRD Sulsel untuk bertarung sebagai calon Bupati Gowa periode 2016-2021.

Bila melihat sumber media tempo.co berbagai posisi jabatan keluarga Limpo di Sulawesi Selatan dapat digambarkan seperti Syahrul Yasin Limpo, yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Selatan. memulai karier pemerintahan dari jabatan lurah, camat dan dua periode menjadi bupati di Gowa, menjadi Kabag Humas Pemprov Sulsel dan terpilih sebagai wakil gubernur Sulsel mendampingi HM Amin Syam, periode 2003-2008. Gubernur Sulsel dua periode, 2008-2013 dan 2013-2018, Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Sulsel periode 2009-2014 dan menjadi Ketua

Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Dewi Yasin Limpo, anggota Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Hanura, Dewan Pertimbangan PPK Kosgoro Sulsel, Ketua DPP Wanita Kosgoro 2013, Bendahara Umum DPP Aspindo 2012, Ketua Perhimpunan Nelayan Tradisional Sulsel 2012, Ketua DPP Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia 2014, Pengurus DPP Partai Hanura.

Ichsan Yasin Limpo, yang merupakan Bupati Gowa dua periode 2005-2010 dan 2010-2015, pengurus Partai Golkar Sulsel, mantan Ketua Umum FKPPi Sulsel dan pernah mengabdikan diri di bidang sosial sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sulsel. Haris Yasin Limpo mantan anggota DPRD Makassar periode 2009-2014, Ketua Harian DPD Partai Golkar Makassar, dan pernah sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

Irman Yasin Limpo, yang merupakan mantan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Sulsel, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pemprov Sulsel. Selain itu putra-putri Yasin Limpo, dua cucu Yasin Limpo menjadi legislator, masing-masing Thita Syahrul YL anggota DPR RI Fraksi

**Politik Kekerabatan Limpo di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan...**

PAN, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo pernah sebagai anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar. Adnan mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Kabupaten Gowa.

Kontestasi politik electoral di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 sangat menarik. Dari daftar calon pasangan kepala daerah terdapat dua calon kepala daerah yang berasal dari keluarga yang sama, atau kekerabatan yang sama yaitu kekerabatan Limpo. Kedua calon kepala daerah tersebut adalah Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan Tenri Olle Yasin Limpo. Adnan merupakan putra dari bupati Gowa dua periode Ichsan Yasin Limpo sedangkan Tenri Olle merupakan kakak dari Ichsan Yasin Limpo.

Kontestasi antar kandidat calon kepala daerah dari keluarga Limpo di kabupaten Gowa diunggulkan oleh Adnan sebagai putra sang bupati. Kuatnya pengaruh keluarga Limpo di Sulawesi Selatan begitu jelas terlihat dengan kepercayaan masyarakat Gowa yang masih memilih pemimpin dari keluarga Limpo. Bahkan di kabupaten Gowa kedua calon dari keluarga Limpo berada di urutan teratas survey LSI hasil

perhitungan cepat Pilkada kabupaten Gowa 2015.

Menurut data LSI hasil *quick count* pilkada kabupaten Gowa versi LSI pasangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan Abdul Rauf unggul 40,19 persen, Adnan merupakan anak dari Ichsan Yasin Limpo. Pasangan Tenri Olle Yasin Limpo dan Wahyu Permana Kaharuddin hanya memperoleh 25,58 persen. Pasangan Syahrur Syafruddin Daeng Jarung dan Anwar Usman hanya 4,33 persen dan terakhir pasangan Djamaluddin Maknun dan Masykur hanya memperoleh 1,91 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari sisi modalitas yang dimiliki keluarga Limpo sangat memadai dan tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi rivalnya dalam kontestasi electoral di kabupaten Gowa. Penguasaan sumber daya yang besar oleh keluarga Limpo baik di bidang pemerintahan dan bisnis sangat sistematis. Sehingga akumulasi kekayaan sangat besar dan sangat kuat dalam mempertahankan kekayaannya. Salah satu cara yang digunakan oleh keluarga Limpo dalam mempertahankan kekuasaannya adalah dengan menunjuk keluarga ikut dalam kontestasi.

Kasus di kabupaten Gowa, pasangan yang unggul adalah putra bupati Gowa itu sendiri yakni Ikhsan Yasin Limpo. Hal ini merupakan cara yang dilakukan untuk melanjutkan tongkat estapet kekuasaan kepada anak kandungnya sendiri. Prestasi yang diperoleh oleh pemerintah sebelumnya yakni Ikhsan Yasin Limpo bisa menjadi instrument yang digunakan putranya dalam meyakinkan pemilih untuk melakukan hal yang lebih baik bagi daerahnya. Disamping itu tentu kekuatan modal atau sumber daya yang dimiliki oleh keluarga sangat mumpuni dalam berkontestasi.

Konsep yang dikemukakan oleh Winters mengonfirmasi bagaimana para oligark yang ada ditingkat lokal melakukan wealth defense atau mempertahankan kekayaannya dengan berbagai cara salah satunya dengan jalan menjadi pejabat publik. Pejabat public mempunyai kekuasaan yang sangat bisa mempengaruhi banyak hal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Penunjukan Adnan sebagai calon bupati merupakan salah satu upaya mempertahankan kekayaan melalui jalur kekuasaan.

Kekuasaan dan kekayaan merupakan intisari dari oligarki. Oleh karena itu, para oligark selalu mempertahankan kekayaan

dan kekuasaan yang dimiliki. Praktek dengan menurunkan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga atau kerabat merupakan salah satu cara agar mudah mengatur berbagai sumber daya material yang telah dikuasai oleh para oligark. Kuatnya oligarki di daerah seolah mencerminkan bahwa kekuasaan di daerah bersifat tunggal atau hanya dikuasai oleh segelintir kelompok saja.

Kekuasaan dan kekayaan yang dipertahankan oleh oligark pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan pribadi kelompok saja meskipun tidak dimiliki oleh personal akan tetapi dimiliki secara kelompok dalam hal ini kerabat oligark. Fenomena ini jelas terlihat dengan adanya kerabat yang diusung dalam setiap pemilihan jabatan politik. Kewenangan yang besar sebagai pejabat publik sangat memungkinkan untuk menunjuk kerabat dalam menempati posisi atau jabatan di ranah non pemerintahan seperti di BUMD.

Sistem desentralisasi yang diberlakukan pasca reformasi menyebabkan kekuatan elit lokal bisa semakin kuat dengan adanya desentralisasi kekuasaan kepada daerah. Dengan adanya desentralisasi daerah memiliki kewenangan lebih untuk mengatur sumber daya yang ada di

**Politik Kekerabatan Limpo di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan...**

daerah. Pasca reformasi dengan terbitnya Undang-Undang tentang otonomi daerah menajdi titik baliknya kekuatan-kekuatan actor lokal di daerah.

Penguasaan sumber daya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memberikan dampak kesejahteraan terhadap rakyat. Karena tujuan desntralisasi kekuasaan adalah untuk memberikan kewenangan di daerah dalm

mengelola sumber daya daerah agar digunakan spenuhnya untuk memajukan dan masyarakatnya. Kekuasaan oligarki juga harus dipantau dengan berbagai indicator hasil kinerjanya. Salah satu aspek yang bisa diamati adalah aspek pembangunan manusia dan aspek kemiskinan di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

**Tabel 1.Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/kota Tahun 2007-2013 di Sulawesi Selatan**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Tahun/ Year						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Selayar	67,74	68,23	68,86	69,34	70,00	70,49	71
Bulukumba	69,27	69,87	70,55	71,19	71,77	72,33	73.21
Bantaeng	68,33	68,87	69,39	70,10	70,66	71,51	72.22
Jeneponto	63,42	64,04	64,55	64,92	65,27	65,56	66.22
Takalar	66,95	67,49	68,04	68,62	69,09	70,14	70.77
Gowa	68,87	69,37	70,00	70,67	71,29	71,60	72.12
Sinjai	68,24	68,74	69,21	69,53	70,16	70,64	71.45
Maros	69,22	69,85	70,56	71,12	71,74	72,54	73.48
Pangkep	67,73	68,30	69,07	69,43	69,89	70,65	71.26
Barru	68,97	69,54	70,30	70,86	71,19	71,70	72.16
Bone	68,34	68,96	69,62	70,17	70,77	71,47	72.08
Soppeng	70,26	70,76	71,26	71,89	72,23	72,57	73.31
Wajo	68,04	68,72	69,44	70,22	71,04	71,67	72.55
Sidrap	71,18	71,74	72,06	72,37	72,74	73,36	74.05
Pinrang	71,43	71,91	72,61	73,21	73,80	74,39	74.87
Enrekang	73,32	73,76	74,19	74,55	74,84	75,30	75.67
Luwu	72,46	72,96	73,59	73,98	74,42	74,81	75.33
Tana Toraja	70,18	70,81	71,39	71,84	72,29	72,90	73.76
Luwu Utara	72,55	73,15	73,65	74,32	74,69	74,97	75.36
Luwu Timur	71,67	71,73	72,29	72,79	73,11	73,36	73.96
Toraja Utara	-	68,41	68,92	69,56	70,15	71,04	71.69
Makassar	77,33	77,92	78,24	78,79	79,11	79,49	80.17



Pare-pare	76,47	76,97	77,45	77,78	78,19	78,63	79.02
Palopo	75,37	75,80	76,10	76,55	76,85	77,28	77.7
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>69,62</b>	<b>70,22</b>	<b>70,94</b>	<b>71,62</b>	<b>72,14</b>	<b>72,70</b>	<b>73.28</b>

Sumber: BPS, 2016

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Gowa di atas dijelaskan bahwa, angka indeks pembangunan manusia di kabupaten Gowa setiap tahunnya cenderung meningkat. Hal ini telah mengindikasikan bahwa adanya progres yang dicapai dalam pembangunan manusia walaupun perkembangannya tidak cukup signifikan. Angka statistik ini dapat dijadikan indikator bahwa oligarki yang terjadi di kabupaten Gowa tetap menghasilkan capaian kinerja pemerintah daerah yang baik dalam hal pembangunan manusia.

Hasil kinerja pemerintah kabupaten Gowa dibawah pimpinan

Ikhsan Yasin Limpo dalam aspek pembangunan manusia sudah cukup baik dengan adanya peningkatan di tiap tahunnya. Perbandingan antara harapan hidup masyarakat Gowa, angka melek huruf, tingkat pendidikan dan standar hidup di kabupaten Gowa mengalami progress yang konsisten. Jika dilihat dari aspek lain yakni masalah kemiskinan, hal ini masih menjadi masalah yang cukup serius di tiap daerah. Kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki oleh para oligark meruapakan dua hal yang mutlak dipertahankan oleh oligarki.

**Tabel 2. Indikator Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013**

No	Indikator/ <i>Indicators</i>	Tahun/ <i>Years</i>				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk Miskin/ <i>Number of Poor People</i>	67.000	62.100	56.600	55.300	61.000
2	Persentase Penduduk Miskin/ <i>Percentage of Poor People</i>	10.93	9.49	8.55	8.05	8.73
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan/ <i>Depth Poverty Index</i>	1.76	1.24	1.27	1.67	1.19

**Politik Kekerabatan Limpo di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan...**

4	Indeks Keparahan Kemiskinan/ Severity Poverty Index	0.43	0.33	0.32	0.64	0.25
5	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)/ Poverty Line	195.452	220.78	245.195	272.31	278.068

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, BPS Kab. Gowa. 2016

Melihat data statistik kemiskinan kabupaten Gowa, jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 sampai pada tahun 2012 cenderung berkurang jumlahnya. Hanya pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di kabupaten Gowa kembali meingkat. Begitu pula dengan presentase penduduk miskin yang juga cenderung menurun tiap tahunnya meskipun pada tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan yang tidak signifikan. Berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang cenderung fluktuatif walaupun tidak juga cukup signifikan perubahannya. Akan tetapi tren penurunan angka kemiskinan dapat terlihat dari data statistik tersebut.

Dengan tampilan data tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa para oligark yang berkuasa juga memerhatikan persoalan kemiskinan yang ada di kabupaten Gowa. Angka kemiskinan yang mengalami tren menurun akan memberikan efek yang sangat bermanfaat. Ketika angka

kemiskinan daerah menurun berarti kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut berjalan dengan baik. Posisi oligark Limpo yang kuat di kabupaten Gowa memberikan citra baik Limpo tersendiri kepada masyarakat Gowa dan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rrayakat kepada para oligark.

Penurunan kemiskinan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Kepercayaan masyarakat Gowa kepada keluarga Limpo dapat terlihat berdasarkan pada pemberian suara yang mengunggulkan keluarga Limpo dalam mengikuti pilkada serentak tahun 2015. Kuatnya posisi oligark di daerah tidak serta merta membiarkan pemerintahan berjalan tidak menghasilkan prestasi. Akan tetapi keberadaan oligark yang kuat seharusnya juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara lebih terjamin.

Hal ini akan menguntungkan keberadaan oligark tersebut jika telah

mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan cara mengurangi tingkat kemiskinan di kabupaten Gowa. Angka statistik dapat dijadikan instrument dalam mendapatkan dukungan dalam pilkada. Prestasi yang telah dicapai dapat digunakan sebagai indicator yang dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap kinerja pemerintha daerah yang telah mengalami progress di setiap tahunnya.

Indikator kemiskinan yang telah diterbitkan oleh badan pusat statistik dapat dijadikan acuan penguasa dalam hal ini oligark untuk mempertahankan kekuasaanya. Dengan membuat suatu kebijakan yang dapat menurunkan angka kemiskinan akan berdampak positif pada kelanggengan oligarki tersebut berkuasa. Indicator kemiskinan tidak hanya diukur dengan konsep financial atau pangan saja akan tetapi butuh aspek lain non financial yang dijadikan sebagai acuan dalam mengukur kemiskinan . Dengan demikian pengambilan kebijakan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat akan lebih maksiamal.

Keluarga Limpo sebagai oligarki di Sulawesi Selatan dapat tetap kuat dan eksis berlangsung karena factor keluarga Limpo yang memang sangat kuat di Sulawesi Selatan. Yasin Limpo sebagai

pencetus oligarki Limpo adalah seorang elit Golkar pada masa orde baru. Sehingga memiliki berbagai sumber daya yang bisa digunakan untuk membangun sistem oligark di Sulawesi Selatan. Bahkan pengaruh keluarga Limpo sampai pada level eselon dua di daerah. Sehingga banyak bupati yang ingin maju dalam kontestasi politik di daerah meminta dukungan kepada keluarga Limpo.

Kuatnya sistem oligarki yang dibangun oleh Limpo dapat terlihat sampai saat ini. Bebebrapa calon kepala daerah amaupaun legislatif berasal dari kerabat Limpo. Masyarakat sebagai pemilih pun tetap menghendaki keluarga Limpo terpilih dalam kontestasi politik yang ada. Kekuatan sistem oligarki dibangun dengan cara yang sangat rapih, berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini kabupaten Gowa dapat memberikan dampak positif dibeberapa sector berdasarkqn data statistik.

Minimnya kasus korupsi atau tindakan abuse of power yang muncul di masyarakat membuat sebagaian masyarakat tetap percaya untuk memilih keluarga Limpo yakni Adnan Purichta untuk menjadi bupati Gowa menggantikan posisi ayahnya yang sebelumnya adalah bupati Gowa Ikhsan

**Politik Kekerabatan Limpo di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan...**

Yasin Limpo. Hal ini merupakan salah satu instrument yang bisa digunakan oleh para oligark untuk tetap mempertahankan kekuasaanya. Disamping telah kuatnya factor keluarga yang ada di tingkat local juga didukung oleh hasil kinerja yang baik di pemerintahan.

Oligarki akan banyak dihujat oleh masyarakat awam ketika oligark melakukan penyimpangan atas kekuasaan yang dimilikinya. Kasus korupsi di level pemerintah dan legislatif merupakan hal yang sangat sensitif bagi kelangsungan oligarki di daerah. Kasus mantan Gubernur Banten yang terjerat kasus korupsi menyebabkan eksistensi oligarki Ratu Atut goyah. Sehingga muncul opini public yang negatif terhadap pemerintahan keluarga Atut di Banten.

Dengan banyaknya kasus penyimpangan yang dilakukan oleh oligark akan sangat berdampak pada eksistensinya. Kecenderungan kekuasaan oligark yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok adalah hal yang sangat dikhawatirkan. Perlunya sistem control dari masyarakat dapat mengawasi kekuasaan para oligark. Demokrasi memberikan ruang untuk

masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Harapannya adalah kebijakan yang diambil dapat menyentuh kebutuhan masyarakat bawah dan tidak hanya memberikan keuntungan bagi elite di daerah saja.

Peranan berbagai NGO di daerah juga dapat membantu mengontrol kekuasaan oligarki di daerah. Peran serikat buruh juga dapat membuat kekuasaan oligark tidak mutlak, berbagai tuntutan yang dilakuakn secara partisipatif akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah. Kebijakan yang pro kepada masyarakat bawah biasanya sangat populis dan mengangkat citra kepala daerah di masyarakat.

Hal tersebut juga dapat diterapkan pada oligarki di daerah. Para oligark yang menempati berbagai jabatan poltik di daerah harus membuat kebijakan yang berdampak positif langsung kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap penguasa menjadi modal yang sangat penting dalam rangka mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Mempertahankan kekuasaan tidak hanya bisa dilakukan dengan membuat sistem kekerabatan yang kuat, demokrasi yang mengharuskan rakyat menjadi prioritas

utama dan mempunyai hak partisipatif membuat para oligark tidak dapat menjalankan kekuasaan secara otoritatif. Oleh karena itu, dengan adanya prestasi yang dilakukan kepala daerah kabupaten Gowa seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan memperkuat posisi oligarki di kabupaten Gowa.

Implikasinya akan berdampak pada mudahnya kerabat Limpo dalam meraup dukungan dalam kontestasi electoral di pilkada serentak 2015. Kuatnya oligarki di kabupaten Gowa juga berdampak terhadap angka pembangunan manusia dan pengurangan jumlah penduduk miskin di kabupaten Gowa. Kemenangan Adnan Purichta Ikhsan Yasin Limpo sebagai bupati Gowa yang terpolih peride 2015-2020 adalah meruapkan salah satu bukti hasil kekuatan oligarki yang sampai saat ini masih eksis di tingkat lokal.

Kontestasi antar kandidat yang berasal dari keluarga Limpo bukan menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat kabupaten Gowa. Keinginan masyarakat Gowa untuk memilih calon kepala daerah di luar keluarga Limpo membuktikan bahwa oligarki yang ada di kabupaten Gowa masih mendapatkan kepercayaan bagi masyarakat kabupaten

Gowa. Strategi dan kebijakan pemerintahan dibawah pimpinan Ikhsan Yasin Limpo tidak menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap keluarga Limpo yang berkuasa. Sehingga oligarki akan menjadi semakin kuat karena selain factor keluarga yang memiliki modal politik yang sangat kuat juga adanya prestasi yang dihasilkan pemerintah kabupaten Gowa dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat Gowa. Hal ini tidak menimbulkan kekecewaan dan keraguan masyarakat local dalam memilih kepala daerah yang berasal dari keluarga Limpo di Sulawesi Selatan.

#### **KESIMPULAN**

Kekuatan politik kekerabatan Limpo di Sulawesi Selatan sangat sistematis. Penempatan berbagai kerabat atau keluarga Limpo dalam berbagai jabatan politik dan non politik memberikan keuntungan dan kemudahan bagi keluarga Limpo mengontrol sumber daya yang ada di kabupaten Gowa. Posisi Ikhsan Yasin Limpo sebagai bupati Gowa periode 2005-2010 dan 2010-2015 menyebabkan penguasaan sumber daya material di kabupaten Gowa oleh keluarga Limpo begitu mudah dilakukan. Usaha mempertahankan

**Politik Kekerabatan Limpo di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan...**

kekuasaan dan kekayaannya pun kini dilanjutkan oleh Ikhsan Yasin Limpo dengan menunjuk anaknya Adnan Purichta Yasin Limpo sebagai calon kepala daerah penggantinya.

Unggulnya Adnan sebagai calon kepala daerah mengindikasikan bahwa oligarki Limpo di Sulawesi Selatan masih sangat eksis. Minimnya perilaku penyimpangan pemerintahan yang dipimpin oleh keluarga Limpo yang sampai pada masyarakat membuat kepercayaan masyarakat terhadap keluarga Limpo masih tetap ada. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan Winters bahwa demokrasi dan oligarki bisa berjalan berdampingan terbukti di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Berbagai data statistik hasil kinerja daerah menggambarkan bahwa adanya progress dari hasil kinerja pemerintahan Ikhsan Yasin Limpo dari tahun ketahun. Hal ini dapat terlihat dari angka pembangunan manusia di kabupaten Gowa yang mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. Begitu pula dengan angka jumlah masyarakat miskin kabupaten Gowa yang cenderung menurun tiap tahunnya. Dari indicator ini dapat dijadikan acuan bahwa kekuatan oligarki yang ada di kabupaten Gowa tidak serta

merta berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah di sektor-sektor tertentu seperti masalah kemiskinan. Meningkatnya angka pembangunan manusia dan menurunnya angka kemiskinan secara statistic di kabupaten Gowa mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data statistic dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah selama masa pimpinan Ikhsan Yasin Limpo. Kuatnya oligarki Limpo di Sulawesi Selatan dikarenakan oleh factor keluarga Limpo yang sudah sangat kuat secara sistem. Memperthankan kekayaan dan kekuasaannya dilakukan dengan menempatkan keluarga Limpo di posisi penting di daerah. Kepercayaan masyarakat pun masih tinggi terhadap keluarga Limpo.

Adanya prestasi dalam meningkatkan pembangunan manusia dan penurunan angka kemiskinan di kabupaten Gowa mencerminkan bahwa kekuasaan oligarki yang ada tidak menyebabkan hasil yang buruk di ranah kinerja pemerintahan. Justru angka kemiskinan yang cenderung menurun tiap tahunnya merupakan dampak atau hasil dari oligarki yang kuat di kabupaten Gowa. Hal ini menyebabkan tidak ada kekecewaan masyarakat

terhadap keluarga Limpo yang ingin berkuasa kembali di kabupaten Gowa.

Angka kemiskinan yang cenderung berkurang dan peningkatan indeks pembangunan manusia selama masa pemerintahan yang dipimpin oleh Ikhsan yasin Limpo dapat dijadikan instrument bagi para oligark untun menunjukkan eksistensinya di tingkat lokal. Sehingga dalam kajian ini dapat kemukakan sebuah preosisi bahwa semakin kuat posisi oligark di kabupaten Gowa akan berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan di kabupaten Gowa.

#### REFRENSI

- Aspinall, E. (2014). *WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism , Social Networks , and Electoral Politics in Indonesia Clientelism , Social Networks ,. April 2015*, 37–41. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Fukuoka, Y. (2012). Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 34(1), 80. <https://doi.org/10.1355/cs34-1d>
- Fukuoka, Y. (2013). Oligarchy and democracy in post-suharto indonesia. *Political Studies Review*, 11(1), 52–64. <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00286.x>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013a). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia, 2013(96Special Issue)*, 35–57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013b). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96(1), 35–57. <https://doi.org/10.1353/ind.2013.0023>
- Haryanto, Sukmajati, M., & Lay, C. (2019). Territory, Class, and Kinship: A Case Study of an Indonesian Regional Election. *Asian Politics and Policy*, 11(1), 43–61. <https://doi.org/10.1111/aspp.12444>
- McCarthy, J. F. (2004). Changing to gray: Decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia. *World Development*, 32(7), 1199–1223. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.02.002>
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. In *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon. <https://doi.org/10.4324/9780203401453>
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal*

- 
- Politik*, 3(2). *No. 96, Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, 19(96), 11–33.  
<https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.116>
- Schofield, N. (2015). The role of government. In *Transport, the Environment and Sustainable Development* (Issue November).  
<https://doi.org/10.4324/9781351121477-4>
- Schrauwers, A. (1999). Negotiating parentage: the political economy of “kinship” in central Sulawesi, Indonesia. *American Ethnologist*, 26(2), 310–323.  
<https://doi.org/10.1525/ae.1999.26.2.310>
- Sunardi, S. (2020). Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 313.  
<https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a7>
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111.  
<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Weintraub, A. N. (2008). “Dance drills, faith spills”: Islam, body politics, and popular music in post-Suharto Indonesia. *Popular Music*, 27(3), 367–392.  
<https://doi.org/10.1017/S0261143008102185>
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia*,
-